

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI BIDANG  
OPERASI DISTRIK NAVIGASI KELAS 1 PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**Elza Putri Anggraini  
07011381621150**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
OKTOBER 2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM AKUNTABILITAS**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI BIDANG**  
**OPERASI DISTRIK NAVIGASI KELAS I PALEMBANG**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik

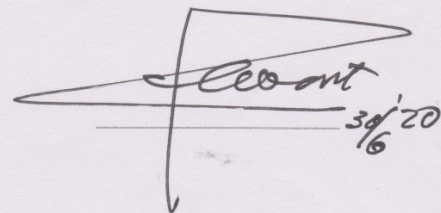
Oleh :

**ELZA PUTRI ANGGRAINI**  
07011381621150

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juni 2020

Pembimbing I

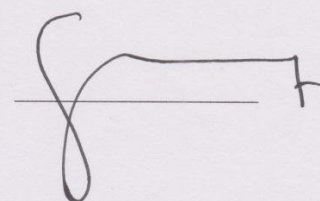
Drs. Joko Siswanto, M.Si  
NIP. 195706051985031004



Handwritten signature of Joko Siswanto, dated 30/6/20.

Pembimbing II

Drs. Gatot Budiarto, MS  
NIP. 195806091984031002



Handwritten signature of Gatot Budiarto.

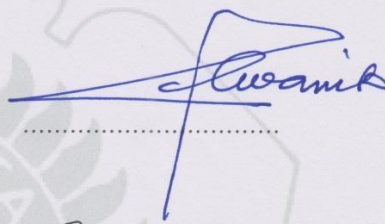
## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Bidang Operasi Distrik Navigasi Kelas I Palembang"* telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 11 Agustus 2020.

Indralaya, 11 Agustus 2020

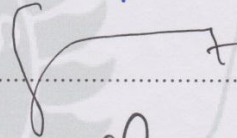
Ketua

1. Drs. Joko Siswanto, M.Si.  
NIP. 195706051985031004

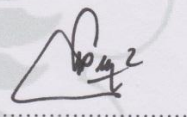


Anggota

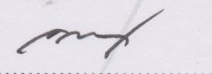
2. Drs. Gatot Budiarto, MS.  
NIP. 195806091984031002



3. Dr. Nurmah Semil, M.Si.  
NIP. 196712011992032002

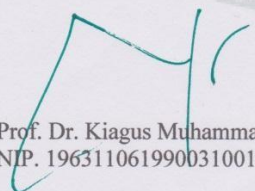


4. Drs. Mardianto, M.Si.  
NIP. 196211251989121001

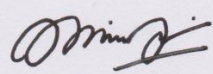


Mengetahui,  
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

**SURAT KETERANGAN PENGECEKAN  
SIMILARITY**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Elza Putri Anggraini  
NIM : 07011381621150  
Prodi : Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity Skripsi/Tesis/Disertasi/Lap. Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Bidang Operasi Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang adalah 24%. Dicek oleh operator UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya.

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat saya pertanggung jawabkan.

Menyetujui  
Dosen Pembimbing,

  
Nama : Drs. Gatot Budiarto, MS  
NIP : 195806091984031002

Indralaya, September 2020  
Yang menyatakan.

  
Nama : Elza Putri Anggraini  
NIM : 07011381621150

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

Dalam hidup tidak ada kata gagal bagi mereka yang telah mencoba, karna kita tidak pernah bisa tahu kesuksesan tanpa pernah mengalami kegagalan.  
Allahumma yassir walaa tu'assir (Ya Allah permudahlah dan jangan Engkau persulit).

**Atas berkah Allah SWT., Skripsi ini  
dipersembahkan untuk :**

Kedua orang tuaku Ayah yang terhebat Yulhaidir  
dan Ibu Tercinta Marleni

Adikku M. Dwico Junistiawan

Keluarga besarku

Sahabat dan Kerabat

Teman-teman AP 2016

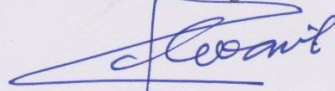
Almamaterku

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih ditemukannya kendala pelaksanaan SAKIP di Distrik Navigasi Kelas I Palembang. Kendala yang dihadapi yaitu keterlambatan penginputan laporan dikarenakan faktor jarak dan waktu yang terlalu jauh dengan Kantor Distrik Navigasi Kelas I Palembang dan dalam proses reviu dan evaluasi yang belum dilaksanakan langsung oleh APIP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Bidang Operasi Distrik Navigasi Kelas I Palembang. Konsep yang digunakan ialah konsep implementasi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SAKIP di Distrik Navigasi Kelas I Palembang belum terimplementasi dengan baik karena masih ada kendala yaitu masih ada keterlambatan dalam penginputan laporan dan masih adanya fungsi SAKIP yang belum berjalan dengan lancar. Saran penelitian ini ialah agar Bidang Operasi Distrik Navigasi Kelas I Palembang lebih meningkatkan kepatuhan pengumpulan laporan, meningkatkan fungsi reviu dan evaluasi, serta meningkatkan pemenuhan Kebutuhan SDM yang sesuai dengan keahlian dan jenjang pendidikan.

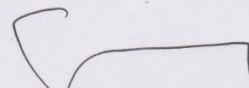
**Kata Kunci:** *Implementasi, SAKIP, Distrik Navigasi Kelas I Palembang*

Pembimbing I



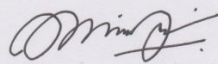
Drs. Joko Siswanto, M.Si.  
NIP. 195706051985031003

Pembimbing II



Drs. Gatot Budiarto, MS  
NIP. 195806091984031002

Indralaya, Agustus 2020  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



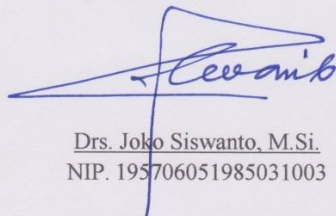
Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## ABSTRACT

This research is motivated by the finding of obstacles in implementing SAKIP in the Class I Navigation District of Palembang. The obstacles faced were the delay in inputting reports due to the distance and time factors that were too far from the Class I Palembang Navigation District Office and in the review and evaluation process that is not carried out directly by APIP. The purpose of this research is to find out the implementation of the Government Agency Performance Accountability System Policy (SAKIP) in the Operational Sector of Class I Navigation District of Palembang. The concept used is the concept of policy implementation. The research method used is descriptive qualitative approach. The data collection techniques consist of interviews, observation and documentation. The results of this research indicate that the implementation of SAKIP policy in the Class I Navigation District of Palembang has not been implemented properly because there are still obstacles, namely there are still delays in inputting reports and there are still SAKIP functions that have not run smoothly. The suggestion of this research is that the Operations Division of the Class I Navigation District of Palembang further improves the compliance of report collection, improves the review and evaluation function, and improves the fulfillment of human resource needs according to the expertise and level of education.

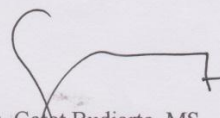
**Key Words:** *Implementation, SAKIP, Class I Navigation District of Palembang*

Advisor I



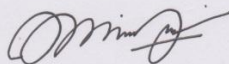
Drs. Joko Siswanto, M.Si.  
NIP. 195706051985031003

Advisor II



Drs. Gatot Budiarto, MS  
NIP. 195806091984031002

Indralaya, August 2020  
Chairman of the Department of Public Administration  
Faculty of Social dan Political Sciences  
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah swt yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini judul “Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Bidang Operasi Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang”

Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu syarat guna menempuh derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Dalam penyusunan skripsi, penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua yaitu Ayah Yulhaidir dan Ibu Marleni, saudaraku Muhammad Dwico Junistiawan yang telah menjadi penyemangat menjalani hidup, memberikan kasih sayang, dukungan, doa terbaik demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Pembantu Dekan I, Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Wakil Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Drs. Joko Siswanto, M.Si selaku Pembimbing I skripsi, yang telah banyak memberikan masukan, nasehat dan ilmunya guna kelancaran skripsi penulis.
5. Bapak Drs. Gatot Budiarto, M.S selaku Pembimbing II skripsi, yang telah banyak memberikan masukan, nasehat dan ilmunya guna kelancaran skripsi penulis.
6. Bapak Adi Karsyaf, S.H., M.H selaku kepala Distrik Navigasi Kelas I Palembang yang telah memberikan izin penelitian dan pengambilan data terkait penelitian penulis di Distrik Navigasi Kelas I Palembang.
7. Pegawai dan staff Distrik Navigasi Kelas I Palembang, terkhusus di Bidang Operasi yang telah berkontribusi besar dan bekerja sama dalam pelaksanaan penelitian skripsi yang dilakukan.
8. Angkatan Almamaterku Ilmu Administrasi Publik 2016.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan guna menyempurnakan skripsi ini dikemudian hari. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, Oktober 2020

**Elza Putri Anggraini**  
**07011381621150**



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI .....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II    TINJUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Kebijakan Publik .....	8
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	10
2.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik .....	12
2.2.1 Model Ripley dan Franklin.....	12
2.2.2 Model Van Meter dan Van Horn (1975) .....	13
2.2.3 Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier .....	14
2.2.4 Model George C. Edward III (1980) .....	16
2.3 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) .....	18
2.3.1 Pengertian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).....	18
2.3.2 Program Aplikasi <i>E-performance</i> .....	19
2.3.3 Tujuan Program Aplikasi <i>E-performance</i> .....	19
2.3.4 Kegunaan Program Aplikasi <i>E-performance</i> .....	20

24	Penelitian Terdahulu .....	20
25	Teori yang digunakan .....	21
26	Kerangka Pemikiran .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis Penelitian.....	25
3.2	Defenisi Konsep.....	25
3.3	Fokus Penelitian .....	26
3.4	Jenis dan Sumber Data .....	27
3.5	Informan Penelitian .....	28
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.7	Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>		
4.1	Gambaran Umum Distrik Navigasi Kelas I Palembang .....	32
4.1.1	Sejarah Terbentuknya Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang.....	32
4.1.2	Visi, Misi, Jargon, Maklumat Pelayanan, Citra Manusia Perhubungan, Nawa Cita, dan Etika Pelayanan Distrik Navigasi Kelas I Palembang.....	33
4.1.3	Tugas dan Fungsi Distrik Navigasi Kelas I Palembang .....	36
4.2	Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah (SAKIP) di Bidang Operasi Distrik Navigasi Kelas I Palembang....	42
4.2.1	Dimensi Tingkat Kepatuhan.....	42
4.2.2	Dimensi Kelancaran Rutinitas Fungsi dan Tidak Adanya Masalah .....	51
4.2.3	Dimensi Kinerja dan Dampak .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan .....	69
5.2	Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perbandingan hasil Evaluasi 2017-2018 sementara tingkat Eselon I.....	2
Tabel 2 : Penelitian terdahulu.....	20
Tabel 3 : Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Bidang Operasi Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang .....	24
Tabel 4 : Laporan bulanan Telkompel.....	54
Tabel 5 : Laporan bulanan Kapal Negara .....	54
Tabel 6 : Laporan bulanan Pengamatan Laut dan Bengkel .....	55
Tabel 7 : Kelancaran Rutinitas fungsi Distrik Navigasi Kelas I Palembang .....	65
Tabel 8 : Renstra, target dan realisasi tahun 2019 .....	68
Tabel 9 : Realisasi perjanjian kinerja tahun 2019.....	69
Tabel 10 : Alokasi pagu DIPA tahun 2019.....	71
Tabel 11 : Contoh proses reuiu dan evaluasi .....	72
Tabel 12 : Jumlah Pegawai Distrik Navigasi Kelas I Palembang .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Proses Kebijakan Publik Menurut Anderson.....	10
Gambar 3.2. Model pendekatan Van Meter dan Van Horn.....	14
Gambar 3. 3. Model pendekatan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier .....	16
Gambar 3.4. Model Pendekatan George C. Edward III.....	17
Gambar 3.5. Kerangka Pemikiran .....	22
Gambar 4.1. Struktur birokrasi Distrik Navigasi Kelas I Palembang.....	50
Gambar 4.2. Prosedur Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .....	51
Gambar 4.3. Prosedur penyusunan SAKIP .....	56
Gambar 4.4. Siklus sistem SAKIP.....	56
Gambar 4.5. Alur proses E-performance.....	61
Gambar 4.6. Proses Laporan Kinerja.....	63
Gambar 4.7. Tahapan penyusunan laporan kinerja .....	64
Gambar 4.8. Status pengumpulan data tahun 2019 .....	64

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	74
Lampiran 2. Surat Tugas Pembimbing Seminar Usulan Skripsi .....	77
Lampiran 3. Surat Keputusan Skripsi.....	78
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Seminar Proposal.....	79
Lampiran 5. Lembar Revisi Seminar Proposal.....	81
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian .....	85
Lampiran 7. Kartu Bimbingan Skripsi.....	86
Lampiran 8. Rencana Strategis 2015-2019.....	88
Lampiran 9. Laporan e-performance tahun 2019 .....	92
Lampiran 10. Permenhub Nomor PM 45 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan .....	96

**DAFTAR SINGKATAN**

PP	: Peraturan Pemerintah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
KKN	: Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
UPT	: Unit Kerja Mandiri
IKU	: Indikator Kinerja Utama
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
PK	: Perjanjian Kinerja
RENSTRA	: Rencana Strategis
RKA-KL	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga
APIP	: Aparat Pengawas Internal Pemerintah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Menurut Van Meter & Van Horn dalam Agustino (2016:128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Kualitas kinerja pegawai menentukan perkembangan dari sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi kinerja pegawai dapat diukur dengan kedisiplinan. Peraturan yang mengatur kedisiplinan PNS adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Isi dari peraturan ini yang didalamnya mengatur untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional dan bermoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Di dalam peraturan kedisiplinan ini dibuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran dalam pelaksanaan tugasnya.

Negara Indonesia secara eksplisit mulai mengimplementasikan kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka menyelenggarakan

pemerintah yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) sekaligus sebagai pemenuhan atas tuntutan publik atas akuntabilitas kinerja, pemerintah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan dan rewiu dan evaluasi kinerja yang mulai diberlakukan sejak dikeluarkannya intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 yang selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kementerian perhubungan dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan penyelenggaraan SAKIP sehingga menghasilkan laporan akuntabilitas yang transparan.

Tabel 1.1 Perbandingan hasil Evaluasi 2017 dengan 2018 (Sementara) tingkat Eselon I

No	Eselon I	Nilai		
		Kategori 2017	2017	2018 (Sementara)
1	LITBANG	A	87,61	Proses
2	BPSDM	A	89,50	64,30
3	BPTJ	B	66,60	66,03
4	HUBDAT	A	83,80	68,28
5	HUBLA	A	86,22	80,30
6	HUBUD	AA	90,01	Proses
7	DJKA	A	87,56	69,51
8	ITJEN	A	85,70	75,40
9	SETJEN	AA	92,07	Proses



Hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2017 dalam laporan kinerja instansi pemerintah dengan Kementerian Perhubungan Laut mendapat katagori nilai A dengan nilai 86,22. Sedangkan pada tahun 2018 Kementerian Perhubungan Laut mendapat nilai 80,30 dan masih banyak Unit Eselon I yang masih dalam proses penilaian.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penyelenggaraan SAKIP yaitu:

1. Rencana strategis;
2. Perjanjian kinerja;
3. Pengukuran kinerja;
4. Pengelolaan data kinerja;
5. Pelaporan kinerja;
6. Reviu dan evaluasi kinerja.

Sistem inilah yang kemudian menghasilkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pencapaian sasaran kinerja atau outputnya. Sistem ini mengukur keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan yang dikeluarkan Bidang Operasi Distrik Navigasi Kelas I Palembang dengan instrumen pengukurannya yaitu *e-performance*. Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan sistem *e-performance* adalah teknologi informasi yang digunakan untuk membantu proses pengumpulan dan pengukuran data kinerja unit-unit

kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, yaitu unit kerja kementerian, eselon I dan eselon II dan Unit Kerja Mandiri (UPT). Program *e-performance* dapat diakses dengan mudah melalui internet di situs [www.e-performance.kemenhub.go.id](http://www.e-performance.kemenhub.go.id). Program aplikasi *e-performance* berguna untuk membantu pengumpulan dan pengukuran data kinerja yaitu :

1. Sasaran dari IKU/IKK unit kerja;
2. Perencanaan kinerja (RKT, PK);
3. Pengumpulan data kinerja (capaian kinerja);
4. Pengukuran kinerja;
5. Pengelolaan efisiensi anggaran;
6. Penyajian informasi dan dashboard.

Pengukuran kinerja *e-performance* telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 45 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan kementerian perhubungan pasal 24 ayat (1) yaitu penggunaan instrumen pengukuran dan pengelolaan kinerja secara elektronik berbasis *website* dalam rangka untuk transparansi penyampaian data capaian kinerja dan mendukung kecepatan penyusunan laporan. Sedangkan untuk batas waktu penginputan laporan ke dalam aplikasi *e-performance* tercantum pada pasal 25 ayat (1) yang berisi batas waktu pengisian data capaian kinerja ke dalam sistem aplikasi *e-performance* setelah perjanjian kinerja ditandatangani dilakukan setiap bulan paling lambat :

- a. Kementerian pada hari kerja ke 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- b. Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya dilakukan pada hari kerja ke 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

- c. Unit Kerja Pimpinan Pratama dan Satuan Kerja pada hari ke 5 (lima) pada bulan berikutnya.

Pemerintah kota Palembang telah berupaya untuk mengawasi kinerja kepada PNS melalui penerapan *e-performance*. Melalui penerapan *e-performance* ini PNS diberi kewenangan untuk berpartisipasi dalam aplikasi *e-performance* dengan mengisi data kinerja, pengukuran kinerja sampai dengan penyampaian laporan capaian secara berkala. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat mengukur kinerja PNS secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan sehingga diberikan penghargaan dalam rangka ketaatan asas pelaksanaan proses penyusunan sistem akuntabilitas.

Distrik Navigasi Kelas I Palembang merupakan salah satu instansi pemerintah kota Palembang yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim pada wilayah kerja yang mencakup perairan provinsi Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung. Untuk memberikan pelayanan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim yang baik, Distrik Navigasi Kelas I Palembang juga menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja utama di Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang indikator pengukuran kinerja dengan tujuan organisasi ditentukan oleh kinerja dan keefektifan para pegawai dalam menjalankan tugas. Setiap organisasi pada umumnya mengharapkan para pegawainya melaksanakan tugas secara efektif, efisien, dan professional.

Dengan adanya indikator pengukuran kinerja utama di lingkungan Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang ada beberapa indikator yaitu indikator kinerja utama, indikator kinerja kegiatan yang membuat kebijakan SAKIP dengan instrumen pengukuran *e-performance* belum terimplementasikan dengan baik. Kualitas kinerja pegawai dapat dikatakan baik dan benar apabila capaian kinerja pegawai sudah sesuai dengan target. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pasal 25 ayat 1a yang berisi tentang batas waktu penginputan laporan paling lambat pada hari ke lima (lima) bulan berikutnya. Keterlambatan penginputan laporan dikarenakan faktor jarak dan waktu yang terlalu jauh dengan kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang.

Melihat hal tersebut, perlu diimplementasikan Kebijakan SAKIP agar kebijakan ini berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, harapannya semoga dalam Kebijakan SAKIP dapat terlaksana dengan baik dan akan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sehingga dapat meningkatkan mutu kinerja PNS yang berkualitas dalam lingkungan Distrik Navigasi Kelas I Palembang.

Karena itu, perlu diteliti dan dikaji penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Bidang Operasi Distrik Navigasi Kelas I Palembang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu :  
Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Bidang Operasi Distrik Navigasi Kelas I Palembang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Searah dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penelitian ini,

yaitu:

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Bidang Operasi Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini mengarah kepada :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan dalam sistem informasi khususnya dalam Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Bidang Operasi Distrik Navigasi Kelas I Palembang.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran untuk dijadikan petunjuk dalam meningkatkan kinerja PNS dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Fariied Ali, Andi Syamsu Alam dan Sastro M. Wantu. 2012. *Studi Analisa Kebijakan: Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*. Makasar: Refika ADITAMA.
- Nugroho.D, Riant. 2004. *Public Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Al Fatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdaya Usaha Kecil)*. Bandung : UNPAD PRESS.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: ALFABETA.

### Jurnal

- Silalahi, Jos Gidion. 2016. *Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Studi pada Dinas Kebersihan Kota Pematangsiantar)*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara. <https://docplayer.info/51712040-Implementasi-kebijakan-sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-sakip-studi-pada-dinas-kebersihan-kota-pematangsiantar-skripsi.html> (11 November 2019).
- Yusrianti, Hasni dan Rika Henda Safitri. 2015. *Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang*. *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*. 13(4): 1-3. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jmbs/article/view/3153> (11 November 2019)
- Giantini, Dini. 2014. *Pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan Good Governance (Suatu studi pada Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Wilayah Bandung)*. Bandung : Universitas Pasundan. <http://repository.unpas.ac.id/13756/> (10 Februari 2020)

Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik*. Vol.1 : No.1.

### **Peraturan**

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan  
Kementerian Perhubungan

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2014  
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah